

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner sebanyak 250 sampel, namun yang dikembalikan hanya 241 sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel akuntabilitas publik (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan.
2. Variabel transparansi publik (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai konstanta variabel tranparansi adalah 0,311 (bernilai positif). Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang baik dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah Kota Medan.
3. Variabel pengendalian internal (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,306. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengendalian internal dengan subjek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan uji koefisien nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,167 artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel transparansi yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan akuntabilitas dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan survei yang dilakukan oleh Media Survey Nasional (Median) mengenai penilaian masyarakat Kota Medan, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa kinerja pemerintah Kota Medan tidak memuaskan. Hal ini disebabkan karena ditemukannya masalah-masalah yang terkait dengan praktik suap dan korupsi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Medan perlu untuk meningkatkan transparansi publik agar kinerja instansi pemerintah Kota Medan juga akan semakin membaik dan menjadi lebih terpercaya.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi Kota Medan, maka ada beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian, yaitu:

1. Kesulitan dalam pengumpulan data karena beberapa kantor-kantor OPD Kota Medan tidak mengerti menggunakan *google form* sehingga kembali melakukan penyebaran kuesioner manual ke beberapa OPD Kota Medan yang menyebabkan waktu yang digunakan dalam pengumpulan data menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
2. Beberapa pegawai OPD tidak mengerti dan tidak dapat memahami pertanyaan yang diberikan sehingga dalam pengisian kuesioner jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan pendapat responden yang sebenarnya.
3. Berdasarkan uji koefisien nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang hanya sebesar 0,167 atau 16,7% yang berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7%. Hal ini berarti bahwa masih banyak variabel lain yang memengaruhi kinerja instansi pemerintah.

## 5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa sebaiknya dalam pembuatan kuesioner menggunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami oleh responden. Selain

itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan lain sebagainya untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Damayanti, S. (2017). *Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi*. Sleman: Pencil Press.
- Hartono, J. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPF.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesebelas. Yogyakarta: BPF.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Krisherdian, R. A. G. (2015). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember*. Skripsi: Universitas Jember.
- Lane, J. (2002). *New Public Management*. London: Routledge Publications.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.

- Mardiasmo. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Ningrum, A. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil Dari [Http://Ovy19. Wordpress. Com](http://Ovy19.wordpress.com). Diakses (24 Maret 2022).
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- \_\_\_\_\_. (2004) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.
- Sihaloho, & Halim. (2005). Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur. Organisasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Solo : SNA 8*.
- Sihaloho, J., & Supriono, R. (2013). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–15.
- Sopannah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1160-1173.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua). *Simposium Nasional Akuntansi 10*.